



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
**UNIT KERJA** : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUPARMIN
2. Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3. NHH : 281801

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 1.949.910.000**

1. Tanah Seluas 405 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 174 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.800.000
3. Bangunan Seluas 95 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 7060 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 2815 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 563.000.000
6. Tanah Seluas 1630 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 180 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
8. Tanah Seluas 407 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 36.360.000
9. Tanah Seluas 2521 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
10. Tanah Seluas 119 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 204.750.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 8.000.000**



1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	250.086.877
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.214.996.877
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.214.996.877

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.